



# BULETIN TW IV **TAHETA** 2024

## BPK KALTENG MELAKSANAKAN UPACARA BENDERA, PUNCAK PERINGATAN HUT KE-77 BPK RI



**17 Januari 2024**, bertempat di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah seluruh pegawai melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan HUT ke-77 BPK RI. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar bertindak sebagai inspektur upacara.

Inspektur upacara membacakan pidato sambutan Ketua BPK RI, Isma Yaton. Dalam sambutannya, Ketua BPK RI menyampaikan bahwa BPK telah berupaya meningkatkan kualitas dan manfaat pemeriksaan untuk meningkatkan kontribusi dalam pencapaian tujuan negara, diantaranya BPK telah berhasil melakukan penyelamatan uang dan aset negara atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga semester I tahun 2023 sebesar Rp132,69 Triliun. Selain tu memasuki usia ke-77 tahun, prestasi BPK juga terukir di kancah internasional.

### RANGKAIAN HUT KE-77 BPK RI DI BPK KALTENG





## BPK KALTENG RAIH PENGHARGAAN TERBAIK KEDUA PENILAIAN IKPA TERBAIK KATEGORI PAGU SEDANG BOBOT BESAR TAHUN ANGGARAN 2023



Rabu, 6 Maret 2024, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar menghadiri kegiatan “Stakeholder Day Tahun 2024” di aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh penghargaan “Terbaik Kedua Penilaian IKPA Terbaik Kategori Pagu Sedang Bobot Besar Tahun Anggaran 2023” yang diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

## LIMA PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LHP DENGAN TUJUAN TERTENTU SEMESTER II TAHUN 2023 DARI BPK KALTENG



15 Januari 2024, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar menyerahkan LHP DTT Semester II Tahun 2023 kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakilinya. LHP yang diserahkan merupakan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023. Lima Pemerintah Daerah yang menerima LHP tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Gunung Mas. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa pemeriksaan DTT ini dilaksanakan dalam kerangka pemeriksaan keuangan atas LKPD Tahun Anggaran 2023 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Selain itu Kepala Perwakilan menyampaikan secara ringkas hasil pemeriksaan yang termuat dalam LHP tersebut dan mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Pimpinan DPRD juga dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Kalteng apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP.



# DUA BELAS PEMERINTAH DAERAH MENYERAHKAN LKPD TAHUN 2023 (UNAUDITED) KEPADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dua belas pemerintah daerah menyerahkan LKPD Tahun 2023 (*Unaudited*) kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Dua belas pemda tersebut adalah PemProv. Kalimantan Tengah, Pemkot. Palangka Raya, Pemkab. Kotawaringin Barat, Pemkab. Kotawaringin Timur, Pemkab. Sukamara, Pemkab. Lamandau, Pemkab. Katingan, Pemkab. Kapuas, Pemkab. Pulang Pisau, Pemkab. Seruyan, Pemkab. Barito Timur, dan Pemkab. Gunung Mas. LKPD tersebut langsung diserahkan oleh kepala daerah atau yang mewakili dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar.



Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sembilan pemerintah daerah tersebut telah menyampaikan LKPD dengan tepat waktu. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu dan disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setelah diterimanya LKPD Tahun 2023 (*unaudited*), maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan segera melakukan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

*Tanggung Jawab Layanan Prima!*



## TINGKATKAN KEMAMPUAN PARA PEMERIKSA, BPK KALTENG LAKSANAKAN DIKLAT PERSIAPAN PEMERIKSAAN LKPD TAHUN 2023



Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian para pemeriksa dalam pemeriksaan LKPD, BPK Kalteng menyelenggarakan diklat persiapan pemeriksaan LKPD Tahun 2023 yang dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 13 – 16 Maret 2024 di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pelatihan ini diikuti oleh 85 pemeriksa dengan narasumber yaitu Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat, serta beberapa Pemeriksa Madya dan Pemeriksa Muda di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama pelatihan berlangsung, peserta pelatihan melakukan praktik dan studi kasus agar lebih memahami materi yang disampaikan. Pada kesempatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengundang perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk berdiskusi terkait penyusunan LKPD melalui aplikasi FIMS di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## KEPALA PERWAKILAN BPK KALTENG MELAKSANAKAN ENTRY MEETING PEMERIKSAAN TERINCI ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI TAHUN 2023 PADA POLDA KALIMANTAN TENGAH



Bertempat di Aula Kepolisian Daerah Kalteng, Rabu, 21 Februari 2024, Kalan BPK Kalteng, M. Ali Asyhar, S.E., Ak., C.A., CSFA., C.FrA. selaku Wakil Penanggung Jawab bersama tim pemeriksa melaksanakan entry meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2023. Entry meeting dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen. Pol. Drs. Djoko Poerwanto beserta jajaran. Pemeriksaan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari s.d. 8 Maret 2024.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan 4 hal yaitu kesesuaian Laporan Keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan dengan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).



# DATA STATISTIK LAYANAN PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hasil Kuisiner Pelayanan Permintaan Informasi Bulan Maret 2024



Sudah tahukah Anda bagaimana cara memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan masyarakat?



**Website**  
<http://kalteng-ppid.bpk.go.id>

**Email**  
[palangkaraya@bpk.go.id](mailto:palangkaraya@bpk.go.id)

**Whatsapp**  
 0822-1112-4518

**Datang Langsung:**  
 Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Kalteng  
 Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya,  
 Kalimantan Tengah





# GALERI HUT KE-77 BPK



MEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH



MEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN UNTUK KOMODITAS JAGUNG

**PENYUSUN REDAKSI:  
SUBBAGGIAN HUMAS DAN TU KALAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

MEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN



MEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH

